

Third Party Intervention: Strategi Tiongkok di Konflik Sudan Selatan

Erti Fadhilah Putri^{1*}

Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan, Sentul, Indonesia
E-mail: ¹ertifadhilahputri01@gmail.com*

Abstract

This research explores and details some of the civil conflicts that occurred in South Sudan in 2013 and China's strategy to seek a peace process that China has never done before. The intervention carried out by China today in civil conflict in South Sudan is an effort to bring the peace process known as third party intervention. This study adopted from third party intervention Ronald J. Fisher by using the contingency model as a tool to analyze the stages of intervention carried out by China in accordance with the conditions of the conflict that occurred. This study uses qualitative methods with secondary data collection techniques. The findings of this study indicate that China has an important role in the peace process in the civil conflict of South Sudan. China's active role can be seen that China has taken several forms of interventions such as negotiation, mediation, power mediation, providing development assistance and special consultations. But China's success in pursuing peace in South Sudan is when conflict conditions in the level of destruction of China carry out actions peacekeeping as a form of controlling violence and encouraging arbitration and consultation to realize a ceasefire. China's success in pursuing peace is in line with the contingency model that offers the type of intervention that is suitable at the intervention stage in such conflict conditions. This shows the effectiveness of the contingency model in offering conflict resolution

Keywords: China, South Sudan, Third Party Intervention

PENDAHULUAN

Selatan hanya menyumbang 5% dari impor minyak tahunan Tiongkok namun hal ini juga membawa kerugian bagian Tiongkok dimana saat ini keamanan energi menjadi fokus utama Tiongkok (Blanchard, 2016). Selain minyak yang menjadi prioritas Tiongkok di Sudan Selatan, Tiongkok juga memiliki investasi lainnya seperti 100 perusahaan Tiongkok telah ada di Sudan Selatan sejak tahun 2013. Perdagangan kedua negara juga telah mencapai \$ 534 juta pada tahun 2013 (International Crisis Group, 2017). Tiongkok melihat Sudan Selatan sebagai tempat yang baik untuk berinvestasi, tidak hanya kaya terhadap sumber daya alam namun minimnya pesaing, biaya operasi yang murah serta tenaga kerja yang murah membuat Tiongkok mendapatkan margin keuntungan 50 persen sebelum konflik sipil pecah pada tahun 2013 (International Crisis Group, 2017).

Konflik Sipil di Sudan Selatan telah menarik perhatian Tiongkok untuk berperan aktif dan menjadi aktor sentral dalam upaya perdamaian. Keikutsertaan Tiongkok pada konflik sipil ini merupakan sebuah transformasi kebijakan luar negeri Tiongkok yang sebelumnya sangat kaku. Transformasi kebijakan luar negeri yang proaktif dalam proses perdamaian. Dalam salah satu artikel dalam majalah *Diplomat* berjudul *Can Atheistic China Play Conflict Mediator in 'God's Century'?* ditulis oleh James Chen menyebutkan bahwa insiasi rekonsiliasi dan pembukaan dialog damai bukanlah hal biasa yang dilakukan oleh Negara China. Tahun 2013 telah mengubah prinsip *Non interference* Tiongkok menjadi salah satu resolusi konflik aktif di beberapa konflik di dunia. Adanya pergeseran ini tentu mencerminkan kepercayaan yang tumbuh di kalangan entitas internasional bahwa Tiongkok dibutuhkan terlibat dalam konteks penyelesaian global.

Dalam tulisan Hodzi yang berjudul *Strategy of 'Parallels': China in the South Sudanese armed* menjelaskan bahwa Sudan Selatan merupakan tempat

uji coba “ Trial and Error” China dalam melakukan upaya-upaya perdamaian yang sebelumnya bukan merupakan konsen China (Hodzi, 2014). Bahkan telah diperdebatkan bahwa peran Tiongkok di Sudan Selatan saat ini akan menjadi gambaran bagaimana hubungan Tiongkok di masa depan dengan negara-negara di kawasan Afrika Sub Sahara.

Peran Tiongkok dalam konflik Sudan Selatan adalah menjadi pihak ketiga “*Third Party*” yang mengupayakan beberapa metode dalam menyelesaikan konflik. Dalam hal ini Tiongkok tidak mengambil satu peran saja namun beberapa peran dijalankan China sebagai metode dalam menyelesaikan konflik. Keikutsertaan sebuah negeri menjadi pihak ketiga dalam sesuatu konflik menandakan adanya kepercayaan pihak-pihak yang berkonflik untuk melibatkan pihak lain. Kehadiran pihak ketiga juga mendakan bahwa adanya keinginan kedua belah pihak untuk melakukan perundingan. Selain itu dalam perdebatan lainnya juga menyatakan bahwa negara yang menjadi pihak ketiga memiliki power dalam menghetikan permusuhan (Heynes,2012).

Konflik sipil di Sudan Selatan telah mengarahkan Tiongkok untuk menginterpretasi lebih fleksibel tentang kebijakan non-intervensi melihat peluang pendekatan baru untuk melindungi kepentingannya. Hal yang menarik lainnya adalah perwakilan diplomatik Tiongkok belum pernah mendapatkan pengalaman dalam menyelesaikan konflik dalam bentuk mediasi. Upaya penyelesaian konflik oleh China tentu akan menjadi investasi China dalam mewujudkan hubungan baik kawasan Afrika Sub-Sahara. Hal ini telah menjadi studi kasus yang penting dalam evolusi kebijakan luar negeri Tiongkok secara global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menghimpun data-data sekunder. Baik itu melalui buku, jurnal, dan data-data yang dikeluarkan oleh instansi formal. Keterbatasan literatur yang membahas mengenai upaya

Tiongkok melakukan intervensi di konflik sipil Sudan Selatan. Penulis untuk juga mengumpulkan data melalui berita-berita yang terdapat pada media online terpercaya. Jenis penelitian yang penulis gunakan Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, penulis mencoba menggambarkan bagaimana upaya Tiongkok melakukan intervensi di konflik sipil Sudan Selatan.

PEMBAHASAN

Keterlibatan awal Tiongkok pada konflik Sudan Selatan

Keterlibatan Tiongkok di konflik sipil ini bermula pertemuan Ma Qiang sebagai duta besar Tiongkok untuk Sudan Selatan dengan Presiden Salva Kiir membahas informasi resmi dan kondisi pasca pecahnya konflik sipil di Sudan Selatan. Beberapa hari kemudian pada tanggal 24 Desember 2013, Duta Besar Ma Qiang melakukan diskusi dengan Menteri Luar Negeri Sudan Selatan Mr. Benjamin, bertukar pandangan tentang situasi Sudan Selatan dan mencoba mempromosikan perdamaian disana (Chun at all, 2015). Ma Qiang menanggapi konflik sipil tersebut telah mengancam perusahaan Tiongkok terutama para insinyur dan teknik Tiongkok di daerah konflik. Ma Qiang meminta adanya tindakan dari pemerintah Sudan Selatan yang konkrit untuk mengatasi permasalahan ini, terutama kemauan pemerintah Sudan Selatan untuk melakukan perundingan dengan pihak pemberontak untuk mendapatkan kesepakatan bersama mengenai konflik sipil yang terjadi (Hodzi, 2014)

Dalam mengupayakan perundingan terhadap pihak yang berkonflik Tiongkok segera mengangkat utusan atau perwakilan khusus yang memiliki kredibilitas dan pengetahuan yang luas terhadap permasalahan yang menimpa Sudan Selatan dan negara-negara sekitarnya. Tiongkok mengangkat Zhong Jianhua sebagai perwakilan diplomatik khusus untuk permasalahan di Sudan Selatan. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Hua Chunying mengatakan bahwa utusan khusus Zhong Jianhua mengunjungi Selatan Sudan dan negara-negara tetangga, dan secara aktif membawa upaya

mediasi (Hodzi, 2014). Tiongkok bersedia untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak-pihak terkait dan bersama-sama mendorong pemulihan stabilitas di Sudan Selatan. Adapun hasil dari negosiasi, yang pertama perjanjian gencatan senjata pada tahun 2014

Analisis Strategi Tiongkok Dalam Menyelesaikan Konflik Menggunakan Third-Party Intervention

Praktik *third party intervention* yang dilakukan Tiongkok merupakan bagian dari *peacemaking* dimana Tiongkok berperan aktif dalam bentuk *third party intervention* berupa mediasi, konsultasi, dan bentuk-bentuk intervensi lainnya. Hal ini menjadi kontradiktif dalam kajian kebijakan luar negeri Tiongkok. Dimana Tiongkok memiliki prinsip *non interference*. Beberapa jurnal juga menyebutkan bahwa Tiongkok tidak konsisten terhadap kebijakan luar negerinya. Jurnal lainnya juga menyebutkan bahwa praktik intervensi yang dilakukan Tiongkok di Sudan Selatan merupakan bagian pengembangan dari prinsip *non-interference* yang mana lebih mengembangkan makna urusan internal sebuah negara dapat didefinisikan secara lebih sempit dan *interference* dapat diterima jika merupakan isu keamanan yang mengancam keamanan regional (Lewicki et al., 1992).

Upaya Tiongkok pada penyelesaian konflik ini dimulai dari pertemuan Ma Qing sebagai duta besar Tiongkok untuk Sudan Selatan dengan Presiden Salva Kiir membahas informasi resmi dan kondisi pasca pecahnya konflik sipil di Sudan Selatan. Beberapa hari kemudian pada tanggal 24 Desember 2013, Duta Besar Ma Qiang melakukan diskusi dengan Menteri Luar Negeri Sudan Selatan Mr. Benjamin, bertukar pandangan tentang situasi Sudan Selatan dan mencoba mempromosikan perdamaian di sana. Ma Qiang menanggapi konflik sipil tersebut telah mengancam perusahaan Tiongkok terutama para insinyur dan teknik Tiongkok di daerah konflik. Ma Qiang meminta adanya tindakan dari

pemerintah Sudan Selatan yang konkrit untuk mengatasi permasalahan ini, terutama kemauan pemerintah Sudan Selatan untuk melakukan perundingan dengan pihak pemberontak untuk mendapatkan kesepakatan bersama mengenai konflik sipil yang terjadi (Hodzi, 2014).

Diskusi

- a. Tiongkok melakukan negosiasi kepada pihak pemerintah.

Pada tanggal 21 Desember 2013 Presiden Sudan Selatan Salva Kiir diminta untuk menemui duta besar Tiongkok untuk Sudan Selatan, Ma Qiang. (Hodzi, 2014) Pertemuan kedua pejabat negara tersebut membahas mengenai informasi resmi situasi dan kondisi pasca pecahnya konflik sipil di Sudan Selatan. Bagi *intervener* memahami keadaan kondisi konflik di butuhkan untuk memahami dinamika konflik. Selanjutnya *intervener* juga harus mengkonfirmasi data yang didapat dengan melakukan diskusi bersama dengan aktor-aktor yang terlibat.

Pada tanggal 24 Desember 2013, Duta Besar Ma Qiang melakukan diskusi dengan Menteri Luar Negeri Sudan Selatan Mr. Benjamin, bertukar pandangan tentang situasi Sudan Selatan dan mencoba mempromosikan perdamaian di sana. Ma Qiang menanggapi konflik sipil tersebut telah mengancam perusahaan Tiongkok terutama para insinyur dan teknik Tiongkok di daerah konflik. Ma Qiang meminta adanya tindakan dari pemerintah Sudan Selatan yang konkrit untuk mengatasi permasalahan ini, terutama kemauan pemerintah Sudan Selatan untuk melakukan perundingan dengan pihak pemberontak untuk mendapatkan kesepakatan bersama mengenai konflik sipil yang terjadi (Hodzi, 2017).

Pada 25 Desember 2013, perwakilan khusus pemerintah Tiongkok untuk urusan Afrika Zhong Jianhua mengadakan pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Sudan Selatan Barnaba Marial Benjamin. Zhong Jianhua menunjukkan keprihatinannya atas korban besar yang disebabkan oleh konflik

bersenjata di Sudan Selatan, dan berharap bahwa pihak-pihak terkait Sudan Selatan dapat tetap tenang dan menahan diri, dan menyelesaikan perbedaan mereka melalui dialog damai sesegera mungkin. Zhong Jianhua juga berharap bahwa pemerintah Sudan Selatan akan mengambil langkah-langkah efektif untuk menjaga keamanan pribadi dan lembaga-lembaga Tiongkok di Sudan Selatan. Benjamin setuju dengan peran Tiongkok untuk mengadakan pembicaraan tanpa syarat dengan mantan Wakil Presiden Riek Machar dan presiden Salva Kiir (Chun, 2015).

Perwakilan khusus Tiongkok untuk urusan Afrika Zhong Jianhua mengunjungi Sudan selatan pada 29-30 Desember 2013. Tujuan Zhong Jianhua mengunjungi Sudan Selatan adalah untuk berdiskusi mengenai dampak yang terjadi akibat adanya konflik sipil Sudan Selatan dengan presiden Salva Kiir dan perwakilan khusus Amerika Serikat di Sudan Selatan, Donald, duta besar Amerika Serikat untuk Sudan Selatan, Susan Page dan Mr. Alexander Rondos Perwakilan Khusus EU untuk Afrika (Guo, 2017). Adanya pertemuan dengan beberapa perwakilan diplomatik ini menunjukkan upaya penyelesaian konflik sipil ini tidak hanya dari aktor tunggal namun melibatkan negara-negara dan organisasi kawasan. Hal tentunya berdasarkan dengan kepentingan aktor-aktor tersebut dalam penyelesaian konflik sipil di Sudan Selatan. Pertemuan tersebut menghasilkan permintaan pemerintah untuk menghentikan perang sipil yang mengakibatkan terhentinya pasokan minyak. Negosiasi yang dipelopori oleh Tiongkok ternyata menemui kegagalan. Dimana pada 25 desember 2013 terjadi pertempuran kembali antara pihak pemerintah dan pihak pemberontak di wilayah Malaka. Pertempuran ini telah menewaskan dua penjaga perdamaian india (Sudan Tribune, 2011)

b. Tiongkok melakukan negosiasi dengan pihak pemberontak.

Selanjutnya Diplomat Tiongkok juga melakukan diskusi dengan pihak pemberontak pada 30 desember 2013 dalam perihal menanggapi permintaan

Tiongkok dan IGAD untuk melakukan perundingan bersama mengenai penyelesaian konflik dan negosiasi yang mengkonsolidasi kepentingan pihak pemberontak. Setelah melakukan pertemuan dengan pihak pemberontak sebagai upaya mendorong adanya mediasi dan perundingan. Hasil yang didapat adalah pihak pemberontak mau melakukan perundingan dengan pihak pemerintah dengan beberapa syarat seperti perundingan dilakukan di tempat yang netral dan tidak memperkuat pihak pemerintah maupun pihak pemberontak. Pemberontak boleh mengajukan permintaan atau prasyarat persetujuan. Upaya Tiongkok pada tahap ini telah dilakukan dengan mendorong kedua belah pihak untuk menyetujui adanya mediasi dan perundingan. Namun walaupun pihak pemberontak menyetujui adanya mediasi, pihak pemberontak tetap saja melakukan penyerangan ke beberapa daerah strategis seperti pada ibukota negara bagian Jonglei dan terletak hanya 200 kilometer (125 mil) utara Juba, serta kota Bentiu, ibukota negara bagian penting penghasil minyak (Hodzi, 2014).

Destruction

Tingkatan ini penggunaan kekerasan semakin meningkat antara kedua belah pihak yang berseteru baik itu pihak pemerintah maupun pihak pemberontak saling menggunakan kekerasan. Selain itu penyelesaian konflik antar kedua belah pihak telah melibatkan organisasi internasional dan regional. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi konflik yang terjadi telah memasuki tingkatan terakhir dalam tingkatan eskalasi konflik seperti yang disebutkan sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya pertempuran besar yang terjadi di Bor negara bagian Jonglei. Pasukan pemerintah dan pihak pemberontak saling ingin menguasai wilayah tersebut. Pertempuran kedua belah pihak sangat sengit hingga memakan ratusan korban dari kedua belah pihak. Pertempuran besar ini telah menewaskan sekitar 1.400 warga sipil tewas ketika pemberontak menahan Bor pada 17 hingga 24 Desember (Sudan Tribune, 2011).

Pada tingkatan ini Tiongkok seharusnya melakukan tindakan *peacekeeping* untuk mengontrol kekerasan yang terjadi antara kedua belah pihak dan mengupayakan arbitrase agar terciptanya kestabilan dengan mendorong adanya gencatan senjata sebagai bentuk pengendalian terhadap kekerasan. Namun Tiongkok malah mengupayakan mediasi, konsultasi, dan *power mediation* untuk terciptanya gencatan senjata pada kedua belah pihak.

a) Upaya Mediasi Tiongkok

Sebelum melakukan upaya mediasi, Tiongkok telah melakukan negosiasi kepada pihak pemerintah dan pihak pemberontak. Pada Januari 2014, Tiongkok dan beberapa aktor lainnya seperti Uni Afrika, PBB, IGAD, Uni Eropa, AS, Inggris Norwegia memulai memfasilitasi mediasi antara pemerintah dan pihak pemberontak (International Crisis Group, 2017). Namun sebelum negosiasi dimulai pihak pemerintah melakukan serangan ke daerah-daerah yang dikuasai oleh pihak pemberontak. Hal ini tentunya semakin memperkuat persepsi negatif antar kedua belah pihak. Tiongkok dan IGAD mengupayakan adanya negosiasi antara kedua belah pihak yang akan bertempat di Adi Abbas Ethiopia. Ethiopia menjadi tempat negosiasi dengan pertimbangan bahwa merupakan tempat yang netral untuk melakukan perundingan (J. Hanna & S Capelouto, 2014).

Dalam proses mediasi ini, pihak pemberontak menuntut agar Uganda tidak mendukung pemerintah Sudan Selatan dengan pasukan militer. Seorang juru bicara dari pihak pemberontak mengatakan bahwa menuntut agar Uganda berhenti mendukung pasukan pemerintah sebagai syarat untuk menandatangani gencatan senjata (Sudan Tribune, 2011). Pihak pemberontak juga menuntut pembebasan tahanan politik yang ditahan oleh pemerintah Sudan Selatan. ini merupakan prasyarat sebelum menandatangani gencatan senjata. Dari pihak pemerintah menolak untuk membebaskan 11 tahanan politik.

ia juga mengancam organisasi kemanusiaan yang sedang bertugas di Sudan Selatan telah mendukung gerakan pemberontak. Tiongkok dan IGAD + dalam tahap ini mempolarisasi kepentingan kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak dapat menyetujui gencatan senjata (J. Hanna & S Capelouto , 2014).

Pada 23 Januari 2014, perwakilan dari Pemerintah Sudan Selatan dan perwakilan pemimpin pemberontak Riek Machar mencapai kesepakatan gencatan senjata di Ethiopia. Gencatan senjata ini merupakan momentum awal terciptanya perdamaian setelah 20 hari konflik kekerasan yang terjadi di Sudan Selatan. Tiongkok bersama mediator lainnya seperti Uni Afrika, PBB, Tiongkok, Uni Eropa, AS, Inggris dan Norwegia dan IGAD+ telah mencapai keberhasilan dalam menengahi kepentingan kedua belah pihak (Guo, 2017)

Kesepakatan gencatan tersebut telah telah menghasilkan 2 persetujuan yang harus dipatuhi oleh kedua pihak yang bersengketa. Persetujuan pertama adalah *Agreement on the Status of Detainees Between The Government Of republic of South Sudan And The Sudan People's Liberation Movement/ Army (In Opposition) SPLM/ A (in Opposition)* mengenai tahanan politik (Sudan Tribune, 2011). Persetujuan kedua adalah *Agreement on Cessation of Hostilities Between the the Government Of republic of South Sudan And The Sudan People's Liberation Movement/ Army (In Opposition) SPLM/ A (in Opposition)* mengenai persetujuan penghentian permusuhan. Persetujuan memiliki 11 poin kesepakatan antara pihak pemberontak dan pihak pemerintah (Report et al., 2016). 11 poin tersebut meliputi deklarasi penghentian permusuhan antara kedua belah pihak, penghentian permusuhan menggunakan media propaganda, melindungi warga sipil, membuka bantuan kemanusiaan, komitmen untuk melakukan pengawasan dan verifikasi, membentuk badan pengawas persetujuan, mengoperasikan badan pengawas persetujuan, pendeklarasian penggunaan senjata, Amandement ,Badan penyelesaian konflik dan *Entry Into Force*, dimana perjanjian akan berlaku setelah 24 jam penandatanganan (Report et al., 2016).

Namun perjanjian tersebut akhirnya dilanggar oleh kedua belah pihak. Tiongkok tidak melakukan tindakan intervensi *peacekeeping* seperti yang seharusnya dilakukan oleh *intervener* sesuai dengan *model contingency*. hal inilah yang menyebabkan tingkat kepatuhan terhadap perjanjian gencatan senjata rendah. Pada tingkatan *destruction* penggunaan kontrol *power* oleh pihak ketiga sangat penting dalam terciptanya kestabilan. *Model contingency* menawarkan tindakan *peacekeeping* sebagai bentuk kontrol terhadap *power* yang terjadi. Selanjutnya kedua belah pihak diarahkan pada adanya arbitrase dan konsultasi khusus hal ini bertujuan untuk mengurangi tensi kedua belah pihak sehingga dapat mendorong perjanjian gencatan senjata (Harengel at all 2014).

b) Upaya Konsultasi Tiongkok ke pihak pemerintah dan pihak pemberontak.

Pada 1-3 April 2014, Perwakilan Khusus, Zhong Jianhua, mengunjungi Sudan Selatan, bertukar pandangan tentang situasi saat ini dan hubungan bilateral dengan Presiden Kiir dan Wakil Presiden James Wani Igga (Guo, 2017). Zhong juga bertemu dengan Perwakilan Khusus Hilde F. Johnson Sekretaris Jenderal PBB dan Kepala Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sudan Selatan, dan perwakilan dari IGAD. Adanya kunjungan yang dilakukan oleh Zhong Jianhua merupakan bentuk upaya pengendalian mispersepsi yang terjadi antara pihak pemerintahan dan pihak pemberontak pasca penyerangan setelah persetujuan gencatan senjata. Kondisi konflik semakin memburuk dengan adanya penggunaan kekerasan yang semakin meningkat. Para mediator juga menilai upaya yang dilakukan selama ini masih terbilang lambat dan memerlukan evaluasi kembali untuk mengupayakan kembali persetujuan gencatan senjata. Bagi Tiongkok momentum gencatan senjata merupakan momentum yang dinantikan hal ini berkaitan dengan kepentingan ekonomi Tiongkok yang memerlukan pasokan minyak dari Sudan Selatan. Adanya bentrokan menyebabkan distribusi minyak menjadi terhambat. Tiongkok

mengalami kerugian sebesar 2 juta dolar setiap harinya di karenakan terhambatnya produksi minyak akibat konflik (Guo, 2017).

Pada 9 April 2014, Duta Besar Tiongkok, Ma Qiang mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Benyamin dari Sudan Selatan, membahas situasi di Sudan Selatan dan mencoba untuk mempromosikan *peace talk*. Situasi di Sudan Selatan setelah pelanggaran gencatan senjata semakin memburuk terlebih pihak pemberontak meminta anggota SPLM yang ditangkap segera dibebaskan. Pada bulan April juga terjadi pembantaian besar-besaran yang terjadi di Bentiu yang menewaskan 200 warga sipil yang beretnis dinka yang dibantai oleh pasukan bersenjata Nuer (International Crisis Group, 2017). Kondisi konflik menunjukkan ketegangan yang tinggi antar kedua belah pihak sehingga pada tahap ini sulit untuk membangun kembali kepercayaan antara kedua belah pihak yang berseteru.

Tiongkok mulai menerapkan diplomasi proaktif dan responsif (Nugraha, 2018) untuk mengatasi ketegangan yang terjadi. Hal ini disampaikan oleh salah satu utusan Tiongkok dalam beberapa perundingan dengan pihak-pihak yang terlibat. Penyelesaian konflik merupakan hal yang baru bagi Tiongkok sehingga dibutuhkan kehati-hatian dalam menangani kasus konflik sipil ini. Adanya normalisasi hubungan antara kedua belah pihak menjadi kunci bagi Tiongkok sebagai *Third Party Intervention*. Pada perjanjian putaran kedua gencatan senjata, IGAD dan beberapa aktor lainnya seperti Uni Afrika, PBB, Tiongkok, Uni Eropa, AS, Inggris dan Norwegia berhasil mempertemukan kedua belah pihak pada forum mediasi kembali. Gencatan senjata kembali disepakati oleh kedua belah pihak. Berbeda dengan sebelumnya, persetujuan kali ini menggunakan tempo waktu untuk menandatangani yaitu kurang dari 24 jam dan masa percobaan gencatan senjata 30 hari (Hodzi, 2017). Namun berselang beberapa jam dari persetujuan gencatan senjata. Kedua belah pihak kembali melanggar gencatan senjata dan saling tuduh mengenai penyerang yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Kegagalan melakukan perundingan damai antara kedua belah Pihak yang berseteru dan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan pada putaran kedua proses perdamaian yang tengah berlangsung tentunya menjadi bahan evaluasi bagi para mediator termasuk Tiongkok. Proses perdamaian yang telah diusahakan tidak didukung oleh proses saling percaya antara pihak pemerintah dan pihak pemberontak.

Kondisi konflik sipil di Sudan Selatan telah banyak memakan korban jiwa yang kebanyakan merupakan penduduk sipil, perang yang telah terjadi lebih dari 5 bulan ini telah membuat kelaparan dan kemiskinan serta membuat lebih dari 3.000 penduduk kehilangan tempat tinggal (USAID, 2019). Bagi negara Tiongkok kondisi konflik ini harus dapat dikendalikan. Konflik dengan tindak kekerasan yang tinggi yang cenderung bersifat merusak. Upaya yang dilakukan Tiongkok sebagai bentuk konsistensi terhadap penyelesaian masalah ini adalah Perwakilan Khusus Tiongkok, Zhong Jianhua melakukan pertemuan formal dengan kepala mediator IGAD untuk perundingan perdamaian Sudan Selatan, Seyoum Mesfin, dan negosiator dari sisi pemberontak Taban Deng Gai, membahas situasi saat ini dan proses mediasi di Selatan Sudan. Pihak-pihak tersebut melakukan pertemuan di Ethiopia pada 24 september 2014 (Guo, 2017)

Dari praktik konsultasi di atas dapat dilihat bahwa tindakan konsultasi tidak memberikan dampak signifikan terhadap perdamaian dalam kondisi konflik seperti pada tingkatan *destruction*. Pada tingkatan ini seharusnya Tiongkok melakukan tindakan intervensi *peacekeeping* sebagai bentuk pengendalian kekerasan yang terjadi seperti yang dijelaskan sebelumnya. praktik konsultasi ini bisa digunakan pada tingkatan *segregation* dimana tingkat kekerasan hanya berupa ancaman dari kedua belah pihak.

c) Upaya *Power Mediation* Tiongkok

Setelah upaya mediasi yang dilakukan oleh Tiongkok tidak membawa dampak yang signifikan terhadap perdamaian. Selanjutnya Tiongkok melakukan

tindakan intervensi yang sedikit lebih memaksa dari sebelumnya. Tiongkok mengupayakan mediasi dengan memaksa kedua belah pihak. Hal ini dapat dilihat dari Tiongkok mengupayakan Salva Kiir dan Riek Machar, untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata. Poin utama Tiongkok dalam upaya mediasi dan diskusi bilateral dengan kedua belah pihak adalah permintaan untuk melindungi aset dan investasi ekonomi. Tentara Pembebasan Rakyat (SPLA) mengumumkan pada 16 Januari 2015 bahwa ladang minyak bawah kendali penuh (Guo, 2017).

Hasil perjanjian tersebut adalah respons terhadap tekanan dari Tiongkok, yang menuntut jaminan terhadap perusahaannya. Mariel Benjamin menyatakan bahwa Sudan Selatan berkomitmen untuk melindungi para pekerja dan aset (Hodzi, 2017). Menurut Menteri Informasi Sudan Selatan, Michael Makuei Leuth, pertemuan itu diprakarsai oleh Tiongkok dan dihadiri oleh para anggota dari pihak pemberontak yang dipimpin oleh mantan presiden Riek Machar. Setelah pertemuan, Barnaba Marial Benjamin mengatakan kepada media bahwa Tiongkok menginginkan jaminan bahwa perusahaan-perusahaan minyak (Hodzi, 2017).

Pada tanggal 27 Januari 2015, selama KTT Uni Afrika (AU) di Ethiopia, Wakil Menteri Luar Negeri Zhang Ming melakukan mediasi antara kedua belah pihak mengenai masalah termasuk proses perdamaian di Sudan Selatan. Xie Xiaoyan, Duta Besar Tiongkok untuk Ethiopia dan Duta Besar untuk Uni Afrika, hadir pada pertemuan tersebut (China's MFA, 2014).

Wakil Menteri Luar Negeri Zhang Ming memberi pengarahan kepada kedua belah pihak tentang kehadiran Menteri Luar Negeri Wang Yi mengenai Konsultasi Khusus dalam Mendukung Proses Perdamaian Sudan Selatan yang dipimpin IGAD yang diusulkan oleh Tiongkok serta kontribusi dan upaya Tiongkok dalam mempromosikan proses perdamaian di Sudan Selatan. Zhang Ming juga mendesak pihak-pihak yang bertikai di Sudan Selatan untuk

sungguh-sungguh mengimplementasikan berbagai perjanjian yang ditandatangani. Perjanjian tersebut menghasilkan konsensus yang meliputi pandangan untuk kepentingan negara dan rakyatnya, gencatan senjata, mempercepat langkah dalam mendorong perdamaian. negosiasi untuk kemajuan, membentuk pemerintahan transisi pada tanggal awal dan mempromosikan Sudan Selatan untuk pemulihan awal perdamaian dan stabilitas (China's MFA, 2014).

Pada tanggal 17 agustus 2015 telah tercapai perjanjian permanen mengenai resolusi konflik sipil di Sudan Selatan. *Agreement on The Resolution Of The Conflict in The Republic Of South Sudan*. Dalam perjanjian ini disepakati perjanjian gencatan senjata yang permanen. Pada bab 2 perjanjian gencatan senjata ini terdapat bab yang menjelaskan gencatan senjata dan beberapa tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh kedua belah pihak. Pertama tindakan yang dapat menghambat atau menunda pemberian bantuan kemanusiaan, atau perlindungan bagi warga sipil, dan membatasi pergerakan orang secara bebas. Kedua tindakan dan bentuk kekerasan seksual dan berbasis gender, termasuk eksploitasi dan pelecehan seksual. Ketiga Perekrutan atau penggunaan tentara anak-anak oleh angkatan bersenjata atau milisi yang bertentangan dengan konvensi internasional, tindakan ofensif, provokatif atau tindakan balas dendam. Ini merupakan hasil yang baik dari gencatan senjata yang telah dilakukan sebelumnya. gencatan senjata sebelumnya hanya bertahan beberapa jam setelah penandatanganan. Perjanjian gencatan senjata permanen ini menjadi keberhasilan mediator dalam mengupayakan perdamaian (UNMISS, 15).

Setelah menandatangani perjanjian perdamaian pada agustus 2015. Pihak pemberontak mengadakan serang dan merusak 1.900 rumah di kawasan Central Equatoria sejak September. Hal ini dilakukan oleh pihak pemberontak sebagai respon terhadap kebijakan yang dilakukan oleh presiden Salva Kiir (VOA, 2015). Setelah kesepakatan damai presiden Salva Kiir mengeluarkan perintah untuk menggambar ulang batas-batas internal negara itu,

meningkatkan jumlah negara dari 10 menjadi 28. Hal ini tentunya memicu pertikaian batas terhadap wilayah kekuasaan dari kedua belah pihak. Bagi pihak pemberontak hal ini dianggap sebagai perampasan terhadap wilayah kekuasaan oleh pihak pemerintah. Pihak pemberontak melakukan serangan balasan yang menargetkan wilayah Central Equatoria (Hodzi, 2017).

Gencatan senjata yang kembali diupayakan oleh Tiongkok kembali dilanggar oleh kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan Tiongkok belum dapat menyakinkan kedua belah pihak untuk memperhitungkan dampak yang ditimbulkan akibat adanya kekerasan yang terjadi dari konflik sipil. Rendahnya kepatuhan akan perjanjian membuat kedua belah pihak dengan mudahnya melanggar gencatan senjata meskipun telah dibuat badan pengawas perjanjian. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa ketika tingkatan *destruction* maka intervensi yang dilakukan menurut *model contingency* merupakan intervensi *peacekeeping* dengan mendorong adanya arbitrase dan konsultasi kepada kedua belah pihak selanjutnya pada tingkatan ini *intervener* jug disarankan untuk memberikan bantuan pembangunan (*development aid*) untuk mengatasi dampak kesenjangan yang terjadi akibat adanya konflik. Setelah kondisi membaik maka kedua belah pihak diarahkan kembali proses perdamaian lebih lanjut sesuai dengan *model contingency* yang disarankan.

d) Upaya *Peacekeeping* Tiongkok

Setelah melakukan upaya intervensi yang bersifat diplomasi pada awal terjadinya konflik hingga konflik telah memasuki tingkatan kehancuran. Baru lah pada april 2015 Tiongkok mengirim satu batalion dengan 7000 pasukan perdamaian PBB untuk mengatasi konflik sipil yang cenderung menggunakan kekerasan (International Crisis Group, 2017). Hal ini juga sebagai respon pelanggaran kembali gencatan senjata pada Januari 2015 dan adanya kondisi yang diprediksi oleh PBB akan adanya genosida. Pecahnya bentrokan kedua pada tahun 2016 menyebabkan 2 anggota penjaga perdamaian Tiongkok

terbunuh. Hal ini menjadi perhatian khusus mengenai ancaman kekerasan di Sudan Selatan telah mengancam pekerja penjaga perdamaian. Kondisi konflik yang rawan terhadap penggunaan kekerasan (Hodzi, 2017)

Tindakan Tiongkok melakukan *peacekeeping* ini merupakan operasi penjaga perdamaian besar pertama yang dilakukan oleh pasukan penjaga perdamaian dari Tiongkok. Pasukan perdamaian ini telah mengendalikan kekerasan yang terjadi di Sudan selatan ini berdasarkan dengan pernyataan dari Uni Afrika. Tindakan *peacekeeping* ini merupakan intervensi yang disarankan dalam tingkatan *destructions* hal ini bertujuan untuk mengendalikan kekerasan yang ada walaupun kondisi dan situasi konflik sangat sulit dikendalikan. *Peacekeeping* adalah langkah awal yang baik dalam membangun stabilitas di daerah konflik dan membantu mengarahkan kedua belah pihak untuk melakukan gencatan senjata.

e) *Development Aid* Tiongkok

Pemberian bantuan pada tahap *Destruction* ini bertujuan untuk mengurangi dampak dari distribusi bahan pangan yang tidak merata akibat adanya konflik sipil ini. Pemberian bantuan juga bertujuan mengatasi mengatasi kesenjangan struktural yang terjadi akibat konflik. Kondisi konflik setelah pelanggaran gencatan senjata pada tahun 2016 membuat banyaknya warga sipil Sudan Selatan yang menjadi korban dalam konflik bersenjata di ibu kota juba, hal ini menyebabkan 300 tewas dan ribuan lainnya mencari suaka ke negara-negara sekitar Sudan Selatan. Dalam kondisi demikian, Pemerintah Tiongkok memberikan bantuan kemanusiaan ke Sudan Selatan, termasuk 8.750 ton beras untuk memerangi kelaparan dan 1 juta dolar AS untuk memberantas kolera. Selain bantuan kepada pemerintah Sudan Selatan, Tiongkok juga menyumbangkan 10 juta dolar AS untuk Program Pangan Dunia (WFP), dengan 5 juta dolar AS untuk penyediaan bantuan makanan ke Sudan Selatan dan 5 juta

dolar AS lainnya untuk meringankan beban pasokan makanan untuk para pengungsi dari Sudan Selatan dan Somalia di Kenya. Perjanjian yang relevan dengan WFP ditandatangani di Beijing pada 1 April 2017 (China's MFA, 2015).

f) Konsultasi khusus dan mediasi Tiongkok untuk mendukung proses perdamaian

Setelah adanya *peacekeeping* yang dilakukan oleh Tiongkok, selanjutnya Tiongkok mulai memfasilitasi kedua belah pihak untuk mengadakan konsultasi khusus. Konsultasi ini berguna untuk menganalisis dampak yang terjadi akibat penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Pertemuan konsultasi khusus Tiongkok untuk mendukung proses perdamaian Sudan Selatan yang dipimpin IGAD di Khartoum, ibukota Sudan. Pertemuan tersebut berfokus pada kebutuhan mendesak untuk mengakhiri konflik di Sudan Selatan. Konsultasi tersebut menunjukkan komitmen baru yang ditegaskan kembali oleh perwakilan dari Pemerintah Republik Sudan Selatan dan (SPLM-IO).

Pertemuan berlangsung untuk membantu pihak yang berkonflik mengupayakan proses perdamaian yang dipimpin IGAD menjadi satu-satunya jalan keluar dari krisis. Pertemuan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Sudan Ali Karti, Menteri Luar Negeri Ethiopia dan Ketua Dewan Menteri IGAD saat ini, Dr. Tedros Adhanom, dan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi (International Crisis Group, 2017). Pemerintah Sudan Selatan diwakili oleh Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Barnaba Marial Benjamin, dan SPLM-IO dipimpin oleh Ketua negosiatornya, Taban Deng Gai. Hadir pula Utusan Khusus IGAD termasuk Duta Besar Seyoum Mesfin dari Ethiopia, Jenderal Sumbiyo dari Kenya dan Mohammed El-Daby dari Sudan. Menteri Luar Negeri Sudan Ali Karti memberikan pengarahan kepada media pada akhir pertemuan dan mencatat bahwa konsultasi khusus untuk mendukung proses perdamaian Sudan

Selatan. Penghentian perjanjian permusuhan dan bekerja bersama dalam naungan proses mediasi yang dipimpin IGAD untuk membungkam senjata dan menghentikan perang. Menteri Luar Negeri Wang Yi mencatat bahwa Tiongkok tetap meraih keberhasilan proses mediasi perdamaian yang dipimpin IGAD sejak dimulainya konflik mengutip bahwa Wang Yi mengadakan pembicaraan dengan perwakilan dari dua pihak yang bertikai di Sudan Selatan selama empat kali (Reuters, 2018).

KESIMPULAN

Dari data yang didapat oleh peneliti. Praktik intervensi yang dilakukan oleh Tiongkok pada konflik sipil di Sudan Selatan mengalami keberhasilan namun sebelum itu Tiongkok mengupayakan tindakan intervensi yang tidak disarankan oleh model contingency. Hal ini seperti yang dijelaskan diatas bahwa model contingency memberikan model eskalasi konflik dimana menghubungkan tindakan intervensi yang sesuai dengan kondisi konflik yang ada. Sebagai negara baru yang melakukan intervensi dalam mengupayakan peacemaking hal ini tentunya memerlukan pengalaman-pengalaman yang didapat selama mengadakan proses perdamaian. Hal ini dapat dilihat pada awal Tiongkok mengintervensi Sudan Selatan

Tiongkok menggunakan tipe-tipe intervensi yang berfokus pada proses dan minim terhadap kontrol keputusan. Tiongkok mengupayakan negosiasi ketika tingkatan eskalasi konflik Discussion. Namun upaya Tiongkok mengalami kegagalan dan situasi konflik beralih pada tingkatan Destruction atau tingkatan kehancuran dimana kondisi terendah konflik dengan penggunaan kekerasan dari kedua belah pihak. Pada kondisi yang demikian seharusnya intervener mengambil tindakan intervensi dengan jenis intervensi peacekeeping dimana bertujuan untuk mengontrol kekerasan yang terjadi serta mendorong kestabilan pada kondisi konflik sehingga intervener dapat mengusahakan kembali konsultasi atau arbitrase sehingga dapat mendorong kedua belah pihak

menyetujui gencatan senjata atau mendorong kedua belah pihak menyetujui perdamaian. Hal inilah yang disarankan oleh model contingency. Namun dalam prakteknya Tiongkok tidak melakukan hal demikian. Ketika konflik telah memasuki tingkatan Destruction, Tiongkok melakukan intervensi berupa mediasi dan konsultasi hal ini membuat kedua belah pihak menandatangani gencatan senjata namun perjanjian gencatan senjata tersebut tidak bertahan lama. Hal ini disebabkan oleh ketika tingkatan telah memasuki tingkatan terakhir dimana penggunaan senjata maksimal maka yang harus dilakukan intervensi adalah mengendalikan kekerasan terlebih dahulu, kemudian barulah mendorong kedua belah pihak mengadakan konsultasi dan arbitrase.

Tindakan Tiongkok selanjutnya juga tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh model contingency, sehingga perjanjian gencatan senjata juga tidak bertahan lama seperti yang diusahakan oleh Tiongkok sebelumnya. barulah pada tahun 2015 Tiongkok mulai melakukan intervensi yang bersifat peacekeeping dimana Tiongkok mengirimkan pasukan penjaga perdamaian dan mulai mengontrol kekerasan yang terjadi di konflik. Kemudian ketika kondisi memungkinkan untuk melanjutkan proses perdamaian, Tiongkok mulai mendorong kedua belah pihak untuk melakukan konsultasi khusus untuk menganalisis permasalahan kedua belah pihak dalam konflik sipil ini. Kemudian upaya-upaya Tiongkok juga didukung oleh IGAD+ mengupayakan kembali mediasi dan berhasil membuat kedua belah pihak yang berseteru menandatangani gencatan senjata yang lebih permanen. Tindakan intervensi Tiongkok yang dimulai dari adanya intervensi peacekeeping merupakan tindakan yang sesuai dengan apa yang harus dilakukan intervensi dalam intervensi pihak ketiga. Selanjutnya Tindakan Tiongkok yang mendorong adanya konsultasi dan arbitrase juga merupakan tindakan intervensi yang seharusnya dilakukan intervensi sesuai dengan model contingency. hal inilah yang membuat Tiongkok berhasil membuat kedua belah pihak menyetujui gencatan senjata yang lebih permanen dari sebelumnya. hal ini menjadi menarik

dikarenakan model contingency telah menawarkan model eskalasi konflik yang efektif dalam membuat perdamaian. sebelumnya tindakan Tiongkok belum sesuai dengan model contingency namun ketika tindakan Tiongkok sesuai dengan model contingency, intervensi yang dilakukan Tiongkok menghasilkan gencatan senjata yang permanen. Ini dapat menjadi bukti bagaimana efektifnya model contingency yang dilakukan pihak ketiga dalam mengintervensi konflik sipil.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Buku

- Chun, Z., & Kemple-Hardy, M. (2015). From conflict resolution to conflict prevention: China in South Sudan. *Saferworld CPWG briefing*, 1, 31.
- Blanchard, L. P. (2016). Conflict in South Sudan and the Challenges Ahead. *Congressional Research Service*, 7, 26. <https://doi.org/https://fas.org/sgp/crs/row/R43344.pdf>
- Fisher, R. J. (2001). Methods of Third-Party Intervention. In *Berghof Handbook for Conflict Transformation* (pp. 229–231). http://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2011/2579/pdf/fisher_hb.pdf
- Fisher, R. J., & Keashly, L. (1991). The Potential Complementarity of Mediation and Consultation within a Contingency Model of Third Party Intervention. *Journal of Peace Research*. <https://doi.org/10.1177/0022343391028001005>
- Guo, Q. (2017). *The Principle of Non-interference and China's Role in International Conflict in the New Era*.
- Harengel, P., & Gbadamosi, A. (2014). 'Launching' a new nation: The unfolding brand of South Sudan. *Place Branding and Public Diplomacy*, 10(1), 35-54.
- Hodzi, O. (2014). Strategy of 'Parallels': China in the South Sudanese armed conflict. *Observatoire Chine*, 1–7.
- International Crisis Group. (2017). *China's Foreign Policy Experiment in South Sudan*. July. <https://d2071andvipowj.cloudfront.net/288-china-s-foreign-policy-experiment-in-south-sudan.pdf>
- Jok, J. M. (2014). South Sudan and the prospects for peace amidst violent political wrangling. Sudd Institute..
- Lewicki, R. J., Weiss, S. E., & Lewin, D. (1992). Models of conflict, negotiation and third party intervention: A review and synthesis. *Journal of Organizational Behavior*, 13(3), 209–252. <https://doi.org/10.1002/job.4030130303>

Mcloughlin, C. (2009). Topic Guide on Fragile States. *Governance and Social Development Resource Centre*, 1–88. <https://doi.org/10.1080/09614520701470060>

Maystadt, J. F., Calderone, M., & You, L. (2014). Local warming and violent conflict in North and South Sudan. *Journal of Economic Geography*, 15(3), 649-671.

Nugraha, C. L. (2018). *Penguatan Diplomasi Ekonomi Tiongkok di ASEAN melalui ACFTA Upgrading Protocol*. 5(2), 67–84.

Pendle, N. (2014). Interrupting the balance: reconsidering the complexities of conflict in South Sudan. *Disasters*, 38(2), 227-248.

Report, C. S., Nations, U., Union, A., Knopf, K. A., Studies, S., States, U., & Nations, U. (2016). *Ending South Sudan 's Civil War*. 77, 1–2.

Reuters. (2018). *South Sudan Politics, South Sudan Government and rebels reach peace deal*. 1–10. <https://www.reuters.com/article/us-southsudan-politics/south-sudan-government-and-rebels-reach-peace-deal-idUSKBN1KQoJV>

Spittaels, S., Weyns, Y., & International Peace Information Service (Antwerp). (2014). *Mapping Conflict Motives: The Sudan-South Sudan Border*. International Peace Information Service.

Shankleman, J. (2011). *Oil and State Building in South Sudan*.: US Institute of Peace.

Sudan Tribune. (2011). Sudan's NCP says SPLM has three options to resolve impasse over Abyei. *Sudan Tribune, November 2010*, 36884. <http://www.sudantribune.com/Sudan-s-NCP-says-SPLM-has-three,36884%5Cnhttp://files/1447/Sudan-s-NCP-says-SPLM-has-three,36884.html>

USAID. (2019). *South Sudan - Crisis Fact Sheet #8*. 1–8. https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/south_sudan_cr_fso8_07-18-2019.pdf

Young, J. (2007). *SPLA Disarmanent in Jonglei and its Implications*. April, 1–16.

Dokumen dan berita

Burke, J. (2016, July 12). "South Sudan: is the renewed violence the restart of civil war?". Retrieved 04 24, 2020 from The guardian: <https://www.theguardian.com/world/2016/jul/12/south-sudan-is-the-renewed-violence-the-restart-of-civil-war>

China's MFA. (2014). *Vice Foreign Minister Zhang Ming Meets with President Salva Kiir Mayardit and Opposition Leader Riek Machar of South Sudan*. Retrieved April 24, 2020 from Ministry of Foreign Affairs Of the People's Republic of China: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1233450.shtm

China's MFA. (2015). *Ministry of Foreign Affairs the People's Republic of Chin*. From China Provides Humanitarian Aid to South Sudan, Ministry of Foreign Affairs the People's Republic of China, : https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zwjg_665342/zwbd_665378/t1453571.shtml

Embassy the People's Republic of China in the Democratic Socialist of Sri lanka. (n.d.). *Embassy the People's Republic of China in the democratic socialist of sri lanka*. Retrieved April 24, 2020 from Chinese Government's Special Representative on African Affairs Zhong Jianhua Holds a Telephone Conversation with South Sudanese Foreign Minister on the Situation in South Sudan: <http://lk.china-embassy.org/eng/zgxw/t1114321.htm>

J. Hanna & S Capelouto . (2014, January 23). *South Sudan, rebels reach ceasefire after weeks of fighting*. Retrieved April 24, 2020 from CNN: <https://edition.cnn.com/2014/01/23/world/africa/south-sudan-ceasefire>

Mcneish, H. (2013, December 19). *South Sudan's Machar Speak to Aljazeera*. Retrieved April 04, 2020 from Aljazeera: <https://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/12/analysis-struggle-power-south-sudan-20131217845861691.html>

Namiti, M. (2013, December 17). *Analysis: Struggle for power in South Sudan*. Retrieved 04 24, 2020 from Aljazeera: <https://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/12/analysis-struggle-power-south-sudan-20131217845861691.html>

Reuters. (2018). *South Sudan Politics, South Sudan Government and rebels reach peace deal*. 1–10. <https://www.reuters.com/article/us-southsudan->

[politics/south-sudan-government-and-rebels-reach-peace-deal-idUSKBN1KQoJV](#)

Sudan Tribune. (2011). Sudan's NCP says SPLM has three options to resolve impasse over Abyei. *Sudan Tribune, November 2010*, 36884. <http://www.sudantribune.com/Sudan-s-NCP-says-SPLM-has-three,36884%5Cnhttp://files/1447/Sudan-s-NCP-says-SPLM-has-three,36884.html>

USAID. (2019). *South Sudan - Crisis Fact Sheet #8*. 1–8. https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/south_sudan_crfs08_07-18-2019.pdf

UNMISS. (15). *Agreement On The Resolution Of The Conflict In The Republic Of South Sudan*,. Aliaabbas: UNMISS.

VOA. (2015, September). *South Sudanese Forces Blamed for Torching Thousands of Homes*. Retrieved April 24, 2020 from VOA: South Sudanese Forces Blamed for Torching Thousands of Homes”, VO news, <https://www.voanews.com/a/south-sudanese-forces-blamed-torching-thousands-homes/3790837.html>